

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI DAN KAPASITAS APARATUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN DESA

Anggi Anggreani
anggianggreani454@gmail.com
Yuliasuti Rahayu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study was quantitative, with its aim to find out the effect of transparency, accountability, participation, village apparatus performance on the performance of Village financial. The instrument in the data collection technique was questionnaires that were distributed to the respondents. The respondents were village officials which consisted of the Head of Village, its secretary, treasurer, building officer, government activities executive, the Head of event management team, and family welfare coordinator team. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on the criteria given. In line with that, the questionnaires were distributed to 23 villages. However, only 15 villages completely filled in the data. In total, there were 105 data samples. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The result concluded that transparency, accountability, and village apparatus performance had a positive and significant effect on the performance of Village Funds Allocation Management. In contrast, participation did not affect the performance of Village Funds Allocation Management.

Keywords: GCG, performance of village financial

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kinerja Aparatur Desa terhadap Kinerja Keuangan Desa. Instrumen yang dijadikan alat dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuensioner yang berisi pernyataan tentang pengelolaan dana desa. Sebagai responden adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksana kegiatan pembangunan, pelaksana kegiatan pemerintahan, ketua tim pengelola kegiatan dan tim penggerak kesejahteraan keluarga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner disebar untuk 23 desa, namun hanya 15 desa yang mengisi data dengan lengkap sehingga diperoleh 105 sampel data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: GCG, kinerja pengelolaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjukkan perubahan mendasar dalam kebijakan manajemen pemerintahan daerah, terutama pada kabupaten. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Salah satu pemerintah dalam transfer untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Bantuan langsung ini dipergunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan

prasarana desa untuk memprioritaskan keperluan masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh setiap kepala desa. Pelaksanaan ADD dipergunakan untuk program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan desa. Dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam pengelolaan dana desa.

Kebijakan Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah, dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, Permendagri No.114 Thn 2014. ADD bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima kabupaten atau kota untuk desa. Dalam pembagian (ADD) dengan masing-masing porsi dalam penyaluran dana ADD dengan jumlah 90% alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula, berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa. Dengan ini keuangan desa harus dikelola secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan kegiatan Pemerintahan Desa, yang perlu adanya tata kelola yang baik (*Good Governance*). *Good governance* yang artinya sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik. Pengelolaan Keuangan yang pada pemerintah desa yang dicerminkan dengan praktik-praktik pengelolaan pemerintah yang baik, yang dapat disebut dengan Unsur dari *Good Governance* adalah akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan aparat desa. Namun demikian yang menjadi permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas dikalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian aparat desa sebagai pelaku utama pelaksanaan *good corporate governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Aparatur desa yang terdiri dari para pejabat publik seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Tim Penggerak PKK yang memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan masyarakat. Tetapi sampai sekarang, kita sering belum tahu seperti apa sesungguhnya pelayanan yang akan diterima rakyat sebagai warga Negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan masyarakat.

Kinerja merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik terdapat aspek yang berdampak untuk kinerja pemerintah yakni Transparansi. (Sujarweni, 2015:28) mengatakan keterbukaan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan-pengelolaan keuangan daerah, sehingga saat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat. Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintah yang baik dengan adanya keterbukaan, ketelibatn dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah, keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraa memeberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami dan Nurodin, 2017). Aparatur desa sangat menentukan kinerja pengelolaan ADD. Kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan. Sampai saat ini belum ada standar yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia terkait kualitas aparat yang kompeten dalam mengelola ADD. Sehingga pemerintah desa

memiliki kinerja yang berbeda-beda dalam mengelola ADD. Kapasitas aparatur desa menjadi hal yang utama dalam penentu kinerja keberhasilan pengelolaan ADD.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: Apakah akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kapasitas aparatur berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa di Kecamatan Purwoasri?, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kapasitas aparatur Transparansi terhadap Keuangan Dana Desa di Kecamatan Purwoasri.

TINJAUAN TEORITIS

Transparansi

Transparansi menurut Sujarweni (2015:28) memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai hasil selama mengelola keuangan daerah. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good corporate governance*. Transparansi dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Corynata dalam Santi, 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu bentuk keharusan seorang pemimpin untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diemban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015:28). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang diukur dari segi kualitas dan kuantitasnya. (Mardiasmo dalam Igawahyu, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Partisipasi

Partisipasi banyak menguntungkan bagi suatu organisasi. Melalui partisipasi masyarakat, organisasi dapat membuat suatu akuntabilitas organisasi tersebut semakin baik. Dalam sektor publik maupun pemerintahan, partisipasi masyarakat berperan penting. Corynata (dalam Santi, 2021) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipatif berarti bahwa setiap orang, siapa saja dapat turut serta dalam pengambilan keputusan.

Kapasitas Aparatur Desa

Kapasitas adalah sebagai kemampuan manusia dalam melakukan keberhasilan untuk mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan dengan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan. Dalam konteks pengelolaan keuangan aparatur memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan profesional (Rafar *et al.*, 2015)

Kinerja Keuangan Desa

Kinerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi untuk sebuah organisasi (Nurdianti dan Anita 2014). Sedangkan menurut Mahsun (2014: 25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertua dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja pengelolaan desa diukur untuk menilai perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (Wibowo, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Desa.

Transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi dengan seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa karena transparansi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk agent untuk menunjukkan harapan atau tujuan yang diinginkan oleh principal telah dipublikasikan. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan sosialisasi kepada masyarakat disetiap pencairan dana yang didapatkan dari transfer pemerintah, seperti pemasangan baliho tentang laporan pertanggungjawaban dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawas. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H₁ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan perwujudan untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang yang diterima terhadap faktor eksternal yaitu stakeholders. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari agent kepada principal. Kesuksesan dari organisasi dapat dilihat dari kinerja yang baik. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Santi (2021) ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung antara pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mana akuntabilitas publik termasuk didalamnya, terhadap kinerja organisasi. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Kinerja Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor untuk menentukan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang dalam situasi kelompok untuk mendorong mereka untuk mencapai tujuan yang mereka tuju serta bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Partisipasi yang mempunyai peran dalam mengambil keputusan untuk menjalankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam penyusunan juga pengawasan terhadap organisasi. Pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengalihkan konsep partisipasi yang menuju suatu kepedulian dengan

berbagai bentuk keikutan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, pelaksanaan program proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pengelolaan ADD. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H₃ : Partisipasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa.

Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa

Kapasitas aparatur lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan untuk mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kapasitas aparatur desa. Kinerja aparatur desa akan menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya sekaligus menjadi dasar untuk memahami pengetahuan dasar Akuntansi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa aparatur memiliki peran yang sangat penting yang berupa kompetensi Akuntansi yang baik sehingga mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar *et al.*, 2015). Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H₄ : Aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menganalisis data primer dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden yang dijadikan sampel dari penelitian. Penelitian kuantitatif ini hubungan antar variabel akan dianalisa dengan memakai teori yang obyektif. Data primer merupakan gambaran dari sumber penelitian yang diperoleh secara survei. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yang merupakan objek dari penelitian, sehingga hasil dari pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini hanya berlaku bagi Pemerintah Kecamatan Purwoasri saja. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri 23 desa dengan 161 perangkat desa yang terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoasri. Penelitian melakukan sensus pada setiap desa.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah populasi yang mempunyai karakter tertentu yang telah ditetapkan yang nantinya berguna dalam penelitian. Untuk menentukan teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling* ini, menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:96). Dalam penelitian ini responden yang ditunjukkan kepada setiap individu yang mengetahui tentang pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari : (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Bendahara, (4) Pelaksana Kegiatan Pembangunan, (5) Pelaksana Kegiatan Pemerintahan, (6) Ketua Tim Pengelolaan Kegiatan, (7) TP Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data penting dalam sebuah penelitian, maka teknik dalam pengumpulan data harus dimiliki oleh seorang penelitian sebagai pedoman penelitian yang strategis. Oleh karena itu, berdasarkan sumber data yang diperoleh, penelitian menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari kuisioner. Kuisioner yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2016).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah topik permasalahan yang telah dilakukan peneliti untuk menguji dan memperoleh informasi yang didapatkan sehingga dapat memperoleh jawaban berupa kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh. Variabel pada penelitian terbagi menjadi dua yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Ketika variabel independen digunakan maka variabel dependen juga digunakan bersamaan, dan setiap ada kenaikan variabel dependen maka diikuti pula kenaikan atau penurunan variabel dependen (Sekaran, 2011:117).

Definisi operasional adalah penentuan dan penjelasan mengenai definisi dari masing-masing variabel sehingga menjadi variabel yang terukur dan dapat dianalisis yang diukur antara lain dengan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Penelitian ini menggunakan variabel independen (X) dalam mekanisme yang terdiri empat, yaitu akuntabilitas, transparansi, serta kapasitas aparatur desa. Sedangkan variabel dependen (Y) yang diteliti yaitu (1) kinerja pengelolaan dana desa. Variabel akan diukur dengan instrument kuensioner.

Kuensioner yang digunakan dari Munti dan Fahlevi (2017), Rafar *et al.*, (2015), dan Astuti dan Yulianto (2016). Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang kelompok tentang fenomena social. Dalam penelitian ini skala likert dikategorikan sebagai berikut: (a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), (b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS) (c) Angka 3= Setuju (S), (d) Angka 4 = Sangat Setuju (SS).

Kinerja Keuangan Desa

Kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil sebuah prestasi kerja aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Munti dan Fahkevi, 2017). Kinerja pengelolaan keuangan dana desa ini di tujukan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD sebagai alat ukur yang digunakan oleh perangkat desa untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola keuangan ADD. Adapun instrument kuesioner dalam penelitian ini di tujukan untuk pelaksanaaa ADD dengan menggunakan teori yang mengacu pada penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang terdapat 6 indikator yaitu : (a) Desa kami telah mengalokasikan dana desa dengan tepat dan baik, (b) Desa kami merealisasikan ADD dengan sesuai kebutuhan, (c) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kami mengenai program kerja yang terukur dalam mengelola pendanaanya, (d) Laporan keuangan yang kami sajikan telah mengungkapkan informasi yang cukup memadai, (e) Program yang sudah dilaksanakan didesa kamu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (f) Pembangunan desa kami sudah tercapai sesuai targer yang telah direncanakan.

Transparasi

Transparasi merupakan keterbukaan untuk memperoleh suatu informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Astuti dan Yulianto, 2016). Menurutnya instrument kuensioner transparansi terdiri dari 4 indikator, yaitu: (a) Mekanisme Alokasi penggunaan dana desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKP desa dan ADD, (b) Data dan informasi yang menyangkut pengelolaan ADD diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara yang sederhana oleh para pemangku kepentingan, (c) Dalam penyusunan ADD dengan segala proses dan tahapan yang dilakukan dengan secara tertib, aman, dan terbuka, (d) Mekanisme Aparatur Pemerintah Desa menginformasikan penyelenggaraan

pemerintahan desa secara tertulis dan dipublikasikan dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya (Astuti dan Yulianto, 2016). Indikator akuntabilitas terdiri dari komitmen pimpinan, konsisten dengan UU yang berlaku, pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, berorientasi pada suatu pencapaian yang mempunyai visi, misi, jujur, obyektif, transparansi dan inovatif. Adapun Instrumen kuesioner penelitian ini mengacu pada penelitian (Astuti dan Yulianto, 2016) yang terdapat 4 indikator yaitu: (a) Dalam pengelolaan keuangan desa, realisasi anggaran didasarkan pada RKP Desa dan ADD yang telah ditetapkan sebelumnya, (b) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Aparatur Pemerintah Desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, (c) Keuangan desa dan kekayaan milik desa dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan juga kepada masyarakat/publik, (d) Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara periodik melalui laporan keuangan dan disampaikan secara tepat waktu.

Partisipasi

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa variabel bebas merupakan yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu partisipasi yang merupakan keikutsertaan masyarakat dalam segala hal yang berhubungan untuk pengambilan keputusan yang demokratis serta dalam program dan kegiatan desa. Adapun Instrumen kuesioner penelitian ini mengacu pada penelitian Astuti dan Yulianto (2016) yang terdapat 4 indikator yaitu: (a) Pemerintahan desa memfasilitasi forum perangkat desa yang membahas prioritas program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan rancangan rencana kerja yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, (b) Terdapat sistem pengaduan masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, (c) Penyusunan RKP Desa dan ADD didasarkan pada program atau kegiatan yang berjalan pada periode sebelumnya dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat, (d) Masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penyusunan RKP Desa dan ADD mulai dari memberikan usulan, pendapat, kritik, dan saran.

Kapasitas Aparatur

Kapasitas aparatur yang merupakan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelolaan keuangan berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional Rafar *et al.*, (2015). Adapun Instrumen kuesioner utama penelitian ini mengacu pada penelitian Rafa *et al.*, (2015) yang terdapat 7 indikator yaitu: (a) Kami sebagai aparatur desa memahami semua peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, (b) Setiap pelatihan teknis tentang pengelolaan keuangan desa yang diadakan di kabupaten maupun di kecamatan selalu kami ikuti, (c) Kami teliti dalam menyelesaikan tugas dan fungsi sebagai aparatur desa, (d) Tugas-tugas yang kami laksanakan sebagai aparatur desa cepat dan tepat waktu, (e) Kami sebagai aparatur desa mampu menyusun kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya, (f) Kami sebagai aparatur desa mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dihasilkan, (g) Kami sebagai aparatur desa paham dan terampil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Teknik Analisis Data

Menurut Indrianto (2014), analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Setelah menyebarkan kuisioner kepada responden peneliti menganalisa dengan menggunakan Aplikasi SPSS sebagai analisa datanya. Pengukuran jawaban responden dalam bentuk ukuran skala likert dimana skala ini menilai sikap, pendapat, dan prepepsi responden mengenai fenomenal saat keadaan yang sesungguhnya. Lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi didasari oleh informasi yang didapatkan dari wilayah Purwoasri bahwa Kecamatan Purwoasri memperoleh dana Alokasi Dana Desa (ADD).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kondisi suatu wilayah berperan penting dalam aktivitas sosial penduduk yang tidak terlepas dari keadaan fisiknya. Dalam hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki suatu peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui suatu keadaan dan potensi yang ada di kawasan tersebut.

Statistik Deskriptif Data

Statistik Deskriptif merupakan pengujian untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata jawaban responden dalam menjawab pertanyaan Berikut ini tabel hasil uji statistik deskriptif dari variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kapasitas aparatur desa dan kinerja pengelolaan dan desa.

Tabel 1
Kriteria Pemilihan Responden

Kriteria	Jumlah Desa	Jumlah Responden
Jumlah Responden Aparatur Desa dalam Penyebaran Kuisoner	23	161
Jumlah Respoden Aparatur desa yang mengisi kuisoner atau kuisoner diterima kembali	15	105
Jumlah penyebaran kuisioner yang tidak kembali	8	56

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Ditunjukkan statistic terkait tangapan responden aparatur desa dengan masing-masing kualitas SDM sebagai berikut:

Tabel 2.
Tanggapan Responden Aparatur terhadap Transparansi,

No	Tanggapan	Mean
1	Tranpasansi	3,45
2	Akuntabilitas	3,52
3	Partisipasi	3,30
4	Kapasitas	3,21
5	Kinerja	3,36

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Terlihat pada tabel 2 dapat dilihat bahwa semua variabel yang diteliti memiliki nilai rata-rata di atas sebesar 3. Dari hasil nilai tersebut dapat dilihat bahwa semua responden yang tersebar memilih pendapat atau jawaban setiap item pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yaitu menjawab *Setuju*, maka dari respon yang tersebar ini cukup baik.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data untuk membandingkan antara nilai r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel degree of freedom (df)=n-2, dalam hal ini jumlah sampel yaitu 105-2 maka df=100 sedangkan r hitung dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation*, kemudian nilai *Corrected Item-Total Correlation* dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid.

Hasil Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas merupakan teknik pengujian yang digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban dari setiap variabel yang mana apabila variabel yang digunakan berbeda maka tetap sama dan konsisten jawabannya. Pengujian reliabilitas pada ini juga menggunakan alat bantu statistic yaitu *Cornbach's Alpha*. Suatu kuesioner akan dikatakan handal atau reliable jika hasil dari pengujian menghasilkan angka $\geq 0,6$ sedangkan jika angka yang dihasilkan $\leq 0,6$ maka alat ukur tersebut dikatakan tidak handal atau reliable. Hasil dari pengujian reliabilitas menggunakan *Cornbach's Alpha* pada SPSS Statistics disajikan pada tabel berikut.

Hasil Uji Normalitas

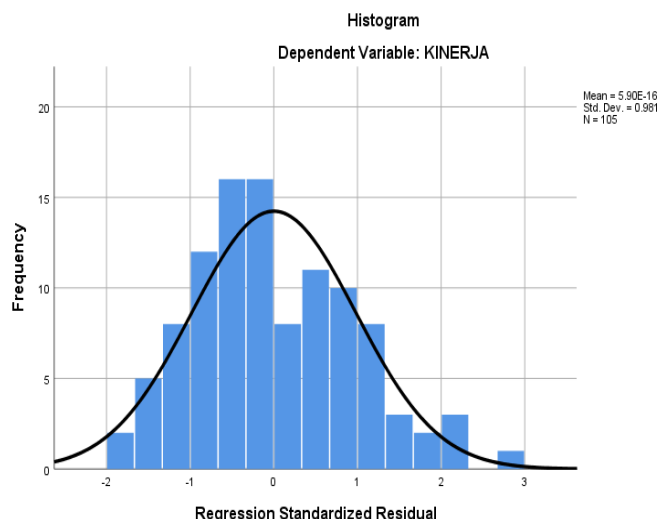
Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*, yang mana apabila nilai *asymp. Sig* atau tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya bila signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan tidak normal. Hasil dari Uji Normalitas yaitu sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

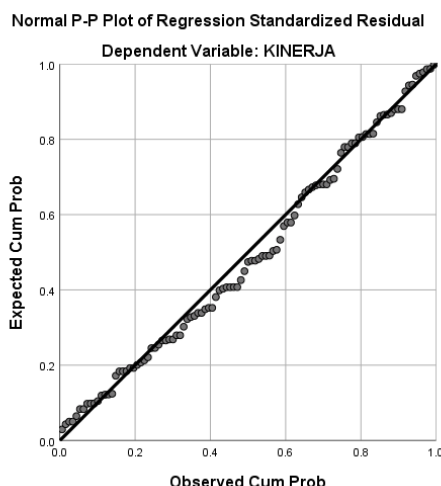
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardizes Residual		
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	1.738
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.032
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.185

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwasannya dalam uji normalitas pada residual regresi menghasilkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,185 sehingga nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari $> 0,05$. Oleh karena itu data peneliti yang telah memenuhi asumsi dan dinyatakan berdistribusi normal sehingga data dapat digunakan untuk penelitian. Dalam uji ini juga dapat dilihat dengan histogram sebagai berikut :



Gambar 1
Histogram Uji Normalitas
 Sumber: Data Primer Diolah, 2023



Gambar 2
Grafik P-Plot Test
 Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Data pada grafik histogram dan p-plot test di atas terdistribusi dengan normal dikarenakan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Uji ini dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi, yang ketentuan nilai VIFnya tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Hasil dari Uji Multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TRANSPARANSI	.681	1.468
	AKUNTABILITAS	.848	1.179
	PARTISIPASI	.691	1.447
	KAPASITAS APARATUR DESA	.926	1.080

a. Dependent Variable: KINERJA (Y)

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian asumsi residual yang menggunakan varians tidak konstan yang mana dapat dideteksi dengan metode chart *scatterplot*. Menurut Ghozali (2018:38). Uji heteroskedastisitas dengan uji glejser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan ketentuan yaitu: (a) Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih kecil dari tabel dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, (b) Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai hitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikan kecil dari 0,05.

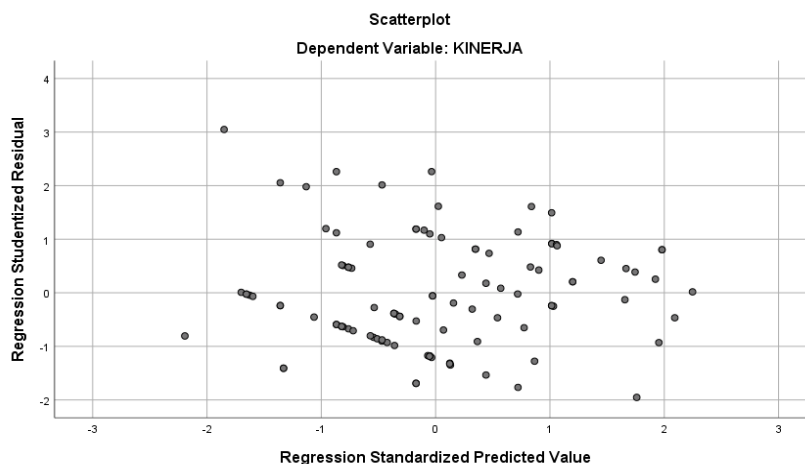
Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.807	1.744		1.609	.111
	TRANSPARANSI	-.063	.076	-.099	-.823	.413
	AKUNTABILITAS	-.057	.071	-.087	-.804	.423
	PARTISIPASI	.058	.080	.087	.726	.469
	KAPASITAS APARATUR DESA	-.024	.050	-.049	-.480	.632

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kapasitas aparatur desa memiliki nilai probabilitas signifiansi di atas 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya pola *scatterplot* yang mendukung bukti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot
Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Analisis Linier Berganda

Regresi Linier Berganda merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Dari hasil Output SPSS dari data penelitian yang ada dapat diperoleh regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.060	2.999		.020	.984
Transparansi (X ₁)	.526	.131	.392	4.004	.000
Akuntabilitas (X ₂)	.374	.123	.267	3.044	.003
Partisipasi (X ₃)	-.058	.138	-.041	-.421	.674
Kapasitas (X ₄)	.375	.086	.366	4.350	.000

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian Koefisien Determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang telah ditetapkan dalam koefisiensi determinasi ini dapat dilihat melalui hasil dari angka koefisien determinasi (R²) dari hasil output SPSS. Nilai koefisien determinasi R² mulai dari angka nol sampai dengan satu. Ketentuan penilaian pengujian ini yaitu apabila nilai R² = 0 maka tidak ada sama sekali variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen, dan apabila R² = 1 maka dapat dikatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat baik. Berikut ini tersaji hasil output SPSS terkait uji determinasi dari data penelitian.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.588 ^a	.345	.319	1.773

a. Predictors: (Constant), Kapasitas Aparatur Desa , Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 17 diketahui koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,345. Besarnya angka koefisiensi determinasi (R Square) adalah 0,588. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel independen (X_1) dan (X_2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) sebesar 34,5%. Sedangkan sisanya ($100\% - 34,5\% = 64,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara keseluruhan mampu mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variable independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan layak. Begitu juga sebaliknya bilamana nilai signifikansi > 0,05 maka variable independen tidak mempengaruhi variabel dependen dan dinyatakan tidak layak.

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.855	4	41.464	13.193	.000 ^b
	Residual	314.278	100	3.143		
	Total	480.133	104			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Kapasitas, Transparansi , Akuntabilias, Partisipasi

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap dependen (Y) atau berarti signifikan karena kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memakai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Uji t menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak, dan apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen signifikan dengan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji T dari output SPSS dari data penelitian.

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	t	Sig.	Keterangan
1	(Constant)	.060	.020	.984	
	Transparansi (X ₁)	.526	4.004	.000	H ₁ diterima
	Akuntabilitas (X ₂)	.374	3.044	.003	H ₂ diterima
	Partisipasi (X ₃)	-.058	-.421	.674	H ₃ ditolak
	Kapasitas (X ₄)	.375	4.350	.000	H ₄ diterima

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sebagai bentuk dari implementasi governance terkait pengelolaan dana desa, Kabupaten Kediri memiliki portal e-Planning tersebut semua pelaporan pengelolaan dana desa untuk desa-desa di Kabupaten Kediri dapat dipantau langsung oleh publik. Semua desa wajib menyampaikan laporan rutin melalui web tersebut, sebagai bentuk transparansi desa dalam mengelola dana desa, dan juga menginformasikan dengan cara menempel sebuah banner yang di tempelkan di papan pengumuman balai kantor desa yang berisi tentang laporan dana desa agar masyarakat dapat melihat langsung. Tujuan dari semua itu agar terbentuknya desa mandiri yaitu pemerintah desa yang mengedepankan transparansi, akuntabel, dan partisipatif.

Hasil ini didukung oleh penelitian Umami dan Nurodin (2017), Juniardi (2015), dan Hendri (2016), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan akuntabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dimana Dana Desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan Desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta dilengkapi dengan laporan-laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan Budiati, *et al.* (2019). Jika masyarakat menemukan kejanggalan dapat langsung ditanyakan kepada Kepala Desa. Laporan-laporan tersebut sebagai contoh bentuk akuntabilitas dari pengelolaan dana desa. Laporan keuangan digunakan untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan. Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Hasil ini didukung oleh penelitian Risyah dan Nurodin (2017) dan Gayatri *et al.*, (2017). Menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, yang dilihat dari hasil kesuksesan dari organisasi tersebut. Kesuksesan dari organisasi dapat

dilihat dari kinerja yang baik. Sehingga akuntabilitas berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi dalam kinerja perangkat desa yang baik.

Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dan desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,674 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan atau hipotesis ketiga (X3) ditolak. Hal tersebut diduga karena rendahnya partisipasi perangkat desa dan masyarakat dalam suatu desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Jumlah dari partisipasi belum tentu menjamin keefektifan kinerja pengelolaan dana desa dalam mengambil keputusan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan atau direncanakan oleh Pemdes Purwoasri. Dalam partisipasi perangkat desa dan masyarakat hanya atas dasar memenuhi regulasi yang menyatakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam rapat koordinasi. Tidak adanya pengaruh partisipasi dalam kinerja pengelolaan dana desa dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan perangkat desa dalam keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa masih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan sedangkan masyarakat juga mementingkan kepentingannya sendiri untuk bekerja memenuhi kehidupannya. Sehingga partisipasi belum mampu meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Tarjono dan Nugraha (2015), karena partisipasi masyarakat mempunyai peran penting dalam otonomi daerah karena dalam partisipasi terdapat aspek pengawasan dan aspirasi, tetapi masyarakat tidak banyak yang ikut partisipasi dalam rapat koordinasi dan ada beberapa desa yang melakukan rapat yang tidak ikut sertakan masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya kapasitas aparatur berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan pada hasil signifikan transparansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kapasitas aparatur merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan pada tingkat, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh individu yang memungkinkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sehingga tercapainya standar kualitas profesional dalam bekerja. Aparatur desa harus memiliki sikap kepercayaan dan nilai serta berfikir kreatif dan inovatif, mempunyai keahlian dan keterampilan yang dimiliki khusus yang berhubungan dengan kompetensi, berpengalaman dalam menguraikan berbagai tugas dan masalah, memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja serta mempunyai pola berpikir yang relatif konseptual dan berpikir analitis dalam kerjanya, maka semakin jelas kemampuan yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi apa yang akan dikerjakannya dan nantinya diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan kinerja keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Budiati, *et al.* (2019) dan Finta dan Heru (2017), yang menyatakan kapasitas aparatur berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (2) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (3) Partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, (4) Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Saran

Maka saran untuk Pemerintah desa disarankan lebih proaktif melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu dalam rapat-rapat koordinasi pembahasan ADD. Untuk meningkatkan kompetensi aparat perangkat desa dalam memahami isi dari peraturan-peraturan terkait pengelolaan dana desa, pemdes perlu untuk memberikan pelatihan-pelatihan, bimtek dan sosialisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Aparatur desa di Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai pengelola keuangan desa sebaiknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sehingga akuntabilitas dapat berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. S, M. S. Yatmi, dan B. Widarno. 2016. Pengaruh Laba Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Return Saham Perusahaan Peserta Corporate Governance Perception Index . *jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*. 12(2): 193 - 199.
- Astuti, T. P., Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1):1-14
- Budiati, Y., E., K. Sugiyanto, dan A. Niati. 2019. Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3(4): 426 - 444.
- Finta, M dan F., Heru. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2) : 172-182
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Gayatri, M., Latri Y. dan N. L. S., Widhiyani. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10 (2) : 175-182
- Igawahyu. (2018). Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi,Pemanfaatan,Teknologi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Kabupaten. *E-Jurnal S1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Hendri, S. BS. 2016. Pengaruh Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana terhadap kinerja pengelolaan Keuangan desa di kabupaten lombok tengah. *Journal Samudra Ekonomika*. 4 (1): 2541-2850
- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta
- Mouallem, L. E., dan F. Analoui. 2014, The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study from the Middle East (Lebanon),*European Journal*, 14, 245-254.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nurdianti, R. dan Anita. 2014. Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja

- aparatus pemerintah daerah di kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (1) : 58-71.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Rafar, T. M., H. Fahlevi dan H. Basri. 2015. Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 4 (2): 125-135.
- Risya, U., and N. Idang. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 6 (11): 74-80
- Santi, S. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(10).
- Sekaran, U. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Umami, R., dan I. Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi* 6(50).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tarjono, dan A. Nugraha. 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Desentralisasi Organisasi terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Analisis pada Pemerintah Kabupaten Pematang). *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen* 1 (1): 85-100.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Perubahan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.